

Latar Belakang

Di Indonesia salah satu penerimaan yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berfokus pada Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Otonomi daerah tersebut harus dilakukan secara nyata, luas dan bertanggungjawab.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting. Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah. Pajak pusat dipungut oleh presiden melalui menteri keuangan dengan pelaksanaannya berada pada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian pajak daerah dipungut oleh kepala daerah, gubernur, walikota, bupati.

Ada perbedaan lapangan pajak antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Daerah provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu: (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air,

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, (3) Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Dan untuk Kabupaten/Kota, pajak daerah yang dipungut ada 8 objek, yaitu: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, (7) PBB – P2, dan (8) Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009:5 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel.

Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan, suatu daerah dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah memberi peluang lebih banyak bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberi keleluasaan pada pemerintah di atasnya. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimiliki khususnya pajak hotel.

Seperti halnya pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya yang ada di seluruh Indonesia, Kabupaten Majene salah satu daerah yang diberi otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kabupaten Majene diharapkan mampu mengelolah dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri. Potensi Kabupten Majene haru dikembangkan sehingga mampu meningkatkan citra daerah.

Kabupaten Majene terletak antara $2^{\circ} 38' 45''$ – $3^{\circ} 38' 15''$ Lintang Selatan dan antara $118^{\circ} 45' 00''$ – $119^{\circ} 4' 45''$ Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kabupaten Mamuju di sebelah utara dan Kabupaten Polewali Mamasa sebelah timur, sedangkan sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Teluk Mamasa dan Selat Makassar.

Kabupaten Majene adalah salah satu dari 5 kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Barat memanjang dari selatan ke utara kurang lebih sepanjang 146 km dari Kabupaten Mamuju (Ibukota Provinsi Sulawesi Barat).

Kabupaten Majene terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 82 (delapan puluh dua) desa/kelurahan, yakni Kecamatan Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammeroddo Sendana, Tubo Sendana, Malunda, dan Ulumanda.

Luas wilayah Kabupaten Majene adalah $947,84 \text{ Km}^2$ dengan ibukota kabupaten terletak di Kecamatan Banggae dengan luas perkotaan 5.515 km , yang berada di posisi selatan Kabupaten Majene, dengan waktu tempuh sekitar 3 jam sampai 4 jam dari Ibukota Sulawesi Barat (Mandar Raya) yaitu $\pm 120 \text{ Km}$. Dari total luas wilayah Kabupaten Majene, Kecamatan Ulumanda merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni $456,00 \text{ Km}^2$, kemudian Kecamatan Malunda dengan luas $187,65 \text{ Km}^2$. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yakni Kecamatan Banggae dengan luas wilayah $25,15 \text{ Km}^2$.

Pada tahun 2008 target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah di Kabupaten Majene dirinci menurut jenis penerimaan adalah Pajak Hotel, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Bahan Galian C dan Restoran adalah sebesar Rp. 1. 086. 608. 700 dan Rp. 1. 077. 278. 395, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1: Target dan Realisasi Pajak Daerah Kab. Majene Tahun 2007

JENIS PENERIMAAN	2007	
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1. Pajak Hotel	18.045.996,-	16.247.000,-
2. Pajak Hiburan	3.000.000,-	3.913.400,-
3. Pajak Reklame	23.465.000,-	23.669.600,-
4. Pajak Penerangan Jalan	672.192.000,-	796.700.250,-
5. Pajak Bahan Galian Gol. C	160.000.000,-	166.121.000,-
6. Pajak Restoran	25.200.000,-	25.780.450,-
JUMLAH	901.902.996,-	1.032.431.700,-

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah

Tabel :2Target dan Realisasi Pajak Daerah Kab. Majene Tahun 2008

JENIS PENERIMAAN	2008	
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1. Pajak Hotel	20.800.000,-	15.123.500,-
2. Pajak Hiburan	10.200.000,-	4.273.500,-
3. Pajak Reklame	25.000.000,-	26.300.600,-
4. Pajak Penerangan Jalan	835.328.595,-	835.328.595,-
5. Pajak Bahan Galian Gol. C	170.000.135,-	170.852.000,-
6. Pajak Restoran	25.200.000,-	25.400.200,-
JUMLAH	1.086.608.730,-	1.077.278. 395,-

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah

Mengingat Pajak Hotel sebagai salah satu penunjang Pajak Daerah Kabupaten Majene, maka pemungutan pajak hotel perlu dioptimalkan. Guna mengoptimalkan sumber komponen pajak daerah ini, tentunya perlu dilakukan perhitungan penerimaan Pajak Hotel pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Majene secara cermat dan akurat yang akan

bermuara kepada peningkatan pendapatan Pajak Daerah khususnya dari penerimaan pajak Hotel pada kantor DISPENDAKabupaten Majene. Besaran dan bentuk Pajak Hotel ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Berikut daftar hotel yang ada di kabupaten Majene Sulawesi Barat: 1. Hotel Bogor, 2. Penginapan Abrar, 3. Penginapan Baluno Beach, 4. Hotel Cilacap, 5. Penginapan Mesra, 6. Penginapan Hijrah, 7. Penginapan Sederhana, 8. Hotel Sulawesi, 9. Hotel Takana Juo, 10. Hotel Tiga Bintang, 11. Wisma Umril.

Kesimpulan

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kabupaten Majene tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2015 diklasifikasikan berada pada kriteria sangat rendah, yang dinilai berdasarkan klasifikasi kontribusi dimana hasil nilai kontribusi Pajak Hotel berada pada rentang 0,53 persen sampai 1,23 persen dan menempati urutan kedua dari terkahir, yaitu urutan ke tujuh dari delapan komponen Pajak Daerah. Adapun realisasi jenis Pajak Daerah yang memiliki kontribusi paling tinggi setelah dihitung dengan menggunakan rumus yang sama yaitu Pajak Penerangan Jalan, dengan rentang hasil nilai 48,36 persen sampai 75,35 persen berdasarkan klasifikasi kontribusi termasuk dalam klasifikasi cukup tinggi. Realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Majene pada tahun 2010 tidak mampu mencapai target penerimaan pajak daerah, pada tahun 2011 realisasi penerimaan mampu mencapai target penerimaan pajak daerah, tahun 2012 juga mampu mencapai target penerimaan pajak daerah, kemudian tahun 2013 juga mampu mencapai target penerimaan, namun pada tahun 2014 realisasi pajak daerah tidak mampu mencapai target penerimaan pajak daerah, begitupun pada tahun 2015 juga tidak mampu mencapai target penerimaan pajak daerah.